

**DILEMA KOLEKTIVITAS PETANI KOPI:  
TINJAUAN SOSIOLOGI WEBERIAN  
(Kasus Petani Kopi di Nagori Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pamatang  
Sidamanik Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)**

*Collectivity Dilemma of Coffee Farmers: Perspective from Weberian Sociology  
(Case of Nagori Sait Buttu Saribu, Pamatang Sidamanik District,  
Simalungun Regency, North Sumatera)*

Rokhani\*), Titik Sumarti, Didin S. Damanhuri, dan Ekawati Sri Wahyuni

Program Studi Agribisnis/Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember

\*) E-mail: rokhanisaid@yahoo.com

**ABSTRACT**

*The aims of this study was to analyze the process of the emergence of collectivity dilemma and efforts to overcome and to analyze the characteristics of farmer groups to facilitate collective action to face the export market. Collective actions with regard to the moral and cultural values are in contrast to rational actions based on individual choices. Collective action is interpreted as a voluntary action taken by the group to achieve a common goal. The discussion of the collective actions is closely related to social capital. Social capital is the factor which seriously becomes the cause and result of collective action. The linkage of the theory of collective action and social capital is the elements of social capital (trust, networks and institutions) which become the frame as well as requirements for collective action. This research is a life history study. Some studies showed that the dilemma arises when individual interests are more dominant than the interests of the group. Dilemma collectivity can be tamed by the trust between individuals in the farmer groups. Collective action in the form of the institution of farmers groups can support farmers to meet the strict requirements required by the export market. Characteristics of farmer groups which can be use to facilitate the collective actions are small number of members, the group is formed on neighborhood ties, head of the group is a farmer as well as a trader and there are some incentives to individuals that involved actively in the group.*

*Keywords: collective action, moral, culture, social capital, export markets, dilemma collectivity*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses munculnya dilemma kolektivitas dan upaya mengatasinya dalam kelembagaan kelompok tani serta menganalisis karakteristik kelompok tani untuk memfasilitasi tindakan kolektif dalam menghadapi pasar ekspor. Tindakan kolektif berkenaan dengan moral dan budaya, berbeda dengan tindakan rasional yang didasari oleh pilihan-pilihan individu. Tindakan kolektif dimaknai sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan mengenai tindakan kolektif erat kaitannya dengan modal sosial. Modal sosial menjadi faktor yang menjadi penyebab dan hasil tindakan kolektif. Keterkaitan teori tindakan kolektif dan modal sosial adalah unsur-unsur modal sosial (kepercayaan, jaringan dan institusi) yang menjadi kerangka sekaligus syarat bagi tindakan kolektif. Penelitian ini merupakan studi riwayat hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilemma kolektivitas petani muncul apabila kepentingan individu lebih dominan dibandingkan kepentingan kelompok. Dilema kolektivitas petani dapat "dijinakkan" dengan kepercayaan antar individu yang tergabung dalam kelompok tani. Tindakan kolektif dalam bentuk kelembagaan kelompok tani dapat membantu petani untuk memenuhi persyaratan ketat yang diajukan oleh pasar ekspor. Karakteristik kelompok tani yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif adalah: jumlah anggota kecil, kelompok dibentuk atas iktan ketetanggaan, ketua kelompok sekaligus menjadi pedagang dan ada pemberian insentif pada individu yang tergabung dalam kelompok.

Kata kunci: Tindakan kolektif, moral, budaya, modal sosial, pasar ekspor, dilemma kolektivitas

**PENDAHULUAN**

Kopi menjadi komoditas perdagangan yang memegang peranan penting baik sebagai sumber devisa nomor tiga setelah kayu dan karet (Spillane, 1990) dan sumber pendapatan. Artinya selain memiliki fungsi ekonomi, kopi juga mempunyai fungsi sosial sebab dengan adanya perkebunan tersebut, berarti memberi kesempatan kerja (Najiyati dan Danarti, 2001).

Senada dengan Spillane (1990) dan Najiyati dan Danarti (2001), Herman (2003) juga berpendapat bahwa kopi merupakan salah satu komoditas perdagangan strategis dan memegang peranan penting bagi perekonomian nasional

hingga akhir tahun 1990-an, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Pasar ekspor kopi diduga merubah rasionalitas petani kopi karena kopi yang sudah menjadi komoditi ekspor membawa dampak monetisasi hingga ke relung kehidupan rumah tangga petani kopi.

Fokus penelitian ini adalah pada tindakan kolektif petani kopi dalam menghadapi pasar ekspor kopi. Pasar mengharap individu saling berkompetisi, sementara struktur yang dipersiapkan oleh pemerintah (*state*) adalah petani kopi harus menjalankan usahanya secara berkelompok dalam wadah kelompok tani. Apabila di pasar aktor secara individu harus bersaing (dengan kekuatan kapital yang dimilikinya),

sementara petani kopi harus kuat secara kolektivitas untuk menghadapi pasar global (pasar ekspor kopi) walaupun secara ekonomi (modal finansial) tidak sekuat eksportir.

Kegundahan inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk menelisik lebih dalam kehidupan petani kopi arabika yang perkembangannya produknya diarahkan *specialty* kopi, dengan harga jual produk yang lebih tinggi daripada jenis kopi robusta. Terkait dengan intervensi *state*, realitasnya pendekatan secara kolektif memang diperlukan petani kopi dalam menghadapi tuntutan pasar ekspor karena sumberdaya secara individu yang terbatas. Namun kelembagaan kelompok tani dengan karakteristik seperti apa yang menjadi instrumen petani untuk melakukan tindakan kolektif juga hendak ditelusuri dalam penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Teoritis Tentang Tindakan Kolektif: dari Oslon (1965) hingga Ostrom, E dan T.K. Ahn (2009).

Tindakan ekonomi menurut Weber adalah tindakan sosial, selalu melibatkan makna dan memperhatikan kekuasaan (Damsar, 1997). Weber memandang sosiologi ekonomi lebih fokus pada tindakan sosial ekonomi dimana tindakan lebih diarahkan pada kepentingan ekonomi yang berorientasi pada *utility* serta menempatkan aktor lain dalam perhitungannya. Artinya Weber mengkombinasikan kepentingan serta menempatkan perilaku sosial dalam perhitungannya (Swedberg, 1998).

Tindakan aktor ekonomi menurut Weber dibedakan menjadi empat. *Pertama*, tindakan rasional instrumental. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang paling rasional atau menduduki posisi paling tinggi daripada ketiga tindakan yang lain. Tindakan ini selalu didasarkan pada: tujuan yang jelas yang akan dicapai; menggunakan alat atau sarana tertentu dalam upaya mencapai tujuan; ada skala prioritas atau kriteria dalam mencapai tujuan; sebelum melakukan tindakan dipikirkan matang-matang aspek positif atau negatif yang akan muncul dari tindakan tersebut; dan kemampuan meramalkan atau memprediksi masa depan dari tindakan tersebut. *Kedua*, tindakan rasional yang berorientasi nilai. Tindakan ini tujuannya sudah ada dalam hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut, individu sudah dibekali seperangkat nilai untuk dipilih; pertimbangan kegunaan dan efisiensi sudah ada pedomannya; Sekalipun nilai bisa berubah, namun sepanjang nilai masih berlaku maka tetap rasional bagi aktor yang melakukannya. *Ketiga*, tindakan tradisional, dengan ciri: merupakan tindakan yang bersifat non rasional; tindakan dilakukan karena kebiasaan masa lalu, tanpa perencanaan secara sadar; individu hanya membenarkan tindakan itu apabila diminta. Tindakan ini akan hilang apabila individu meningkatkan tindakan rasional instrumentalnya. *Keempat*, tindakan afektif, dengan ciri: didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa perencanaan dan pemikiran logis; tindakan ini bersifat non rasional. (Weber, 1978; Kalberg, Stephen, 1980; Swedberg, 1998; 2005; Ritzer dan Goodman, 2004, 2007; Ritzer, 2012).

Tindakan kolektif (*collective action*) diartikan sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh kelompok untuk mengejar mencapai tujuan bersama dalam kelembagaan kelompok tani maupun koperasi. Teori tindakan (*action theory*) adalah perspektif sosiologi yang memfokuskan pada individu sebagai subjek dan melihat tindakan sosial (*social action*) sebagai sesuatu yang bertujuan yang dibentuk oleh individual

dalam konteks sebagaimana diberikan makna olehnya. Mengorganisasikan diri, pada level kelompok menghasilkan seperangkat relasi, yang salah satunya berbentuk organisasi formal. Ini merupakan konstruksi sosial. Konstruksi sosial tersebut melahirkan institusi dan organisasi, yang merupakan media dimana individu menjalankan tindakan sosialnya. Pengorganisasian sekelompok orang, mulai dari bentuk yang sederhana sampai rumit, pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan adanya tindakan kolektif.

Teori tindakan kolektif muncul dari ketidakpuasan dan kegagalan program pembangunan pedesaan tahun 1960-1970-an. Asumsi paradigma pembangunan saat ini adalah masyarakat dilibatkan secara sengaja dalam kegiatan kolektif, dengan sedikit pengawasan dari pemerintah (*state*) guna memahami apa yang terjadi pada suatu kondisi atau bagaimana tindakan kolektif ini bisa dipertahankan (Meinzen-Dick, Di Gregorio, dan McCarthy 2004). Teori tindakan kolektif dimulai dengan karya Olson (1965; 2002), Kikuchi dan Hayami (1987), Meinzen-Dick dan Di Gregorio (2004) hingga Ostrom, E dan T.K. Ahn (2009) untuk menjelaskan kondisi yang memungkinkan mencapai hasil dari tindakan kolektif.

Menurut Oslon (1965; 2002), dalam perspektif ekonomi setiap organisasi pasti menghadapi masalah terkait dengan *free rider*. Olson memberikan dua prasyarat untuk efektivitas organisasi yaitu pemberian insentif kepada anggota dan ukuran kelompok atau organisasi harus kecil. Kelompok-kelompok kecil akan memajukan kepentingan bersama dengan lebih baik daripada kelompok besar. Kelompok kecil lebih mudah diatur dan lebih mudah mengatasi *free rider*.

Untuk merancang tindakan kolektif diperlukan entrepreneur politik (Oslon, 1965). Tugas entrepreneur politik lebih mudah pada komunitas yang berciri sistem sosial ketat, penduduk tidak individualistis dan mengikuti norma-norma masyarakat (bekerjasama atas dasar prinsip moral tradisional seperti: gotong royong). Artinya norma-norma tradisional dan interaksi sosial dalam masyarakat akan berguna dalam merancang tindakan kolektif.

Tindakan kolektif diperlukan untuk menciptakan, memelihara dan mengubah pranata (Hayami dan Kikuchi (1987: 44). Namun sebagaimana dinyatakan Oslon (1965), kesulitan dalam mengorganisasikan tindakan kolektif di tingkat desa adalah munculnya *free rider* (pembonceng) sehingga muncul dilema kolektivitas. Dilema yang serius akan muncul jika keuntungan suatu tindakan kolektif dibagi rata. Jika keuntungan tidak dibagi rata, seorang yang menerima keuntungan besar mungkin mau mengambil inisiatif, tetapi mereka yang mendapat keuntungan kecil akan merugi sehingga tidak mau bekerja sama.

Dalam aksi kolektif, anggota dapat bertindak sendiri, tetapi lebih umum mereka bertindak melalui kelompok atau organisasi; mereka dapat bertindak secara independen atau dengan dorongan atau dukungan dari pihak luar dari badan-badan pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM) atau proyek pembangunan (Meinzen-Dick dan Di Gregorio, 2004).

### Kebebasan Individu dan Tindakan Kolektif

Dewey (1998) adalah tokoh yang membahas tentang ketegangan antara kebebasan individu dengan aksi kolektif (tindakan kolektif) tanpa melupakan konteks sejarah, dimana wacana kebebasan menurutnya tak lepas dari konteks perkembangan pemikiran Eropa pada masa pencerahan, Revolusi Perancis dan gerakan-gerakan hak asasi manusia. Dalam persepektif sejarah, kebebasan merupakan upaya tiap

manusia untuk melepaskan diri dari kolektivitas dan dari pendiktean perjalanan sejarah yang semula ditentukan oleh kekuasaan kolektif gabungan antara gereja, feodalisme dan paternalism (Dewey, 1998:vi).

Kesadaran rasionalitas muncul dan berkembang seiring dengan proses modernisasi. Wacana libertas (kemerdekaan) berkembang seiring dengan perkembangan kesadaran rasionalitas dan subyektivitas (Dewey, 1998:viii). Pandangan Dewey ini sesuai dengan ciri Asia, dimana sekalipun kebebasan individu diberi ruang namun budaya pada suatu periode dan kelompok menentukan pola perilaku yang menandai aktivitas suatu kelompok, keluarga, klan, bangsa, fraksi maupun kelas. Artinya kebebasan individu selalu dibatasi oleh ruang budaya yang menentukan pola perilaku individu. Tindakan kolektif berkenaan dengan moral dan budaya, berbeda dengan tindakan rasional yang didasari oleh pilihan-pilihan individu sebagaimana dikemukakan Weber.

### Tindakan Kolektif dan Modal Sosial

Keterkaitan teori tindakan kolektif dan modal sosial adalah modal sosial (kepercayaan, jaringan dan institusi) menjadi kerangka sekaligus syarat bagi tindakan kolektif. Artinya modal sosial dan interaksi dengan faktor-faktor lain memfasilitasi tindakan kolektif (Ostrom, E and T.K.Ahn, 2009). Kepercayaan menjadi dasar modal sosial (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995), sedangkan menurut Coleman (1990) jaringan menjadi dasar modal sosial. Dalam penelitian ini dipilih tiga jenis modal sosial yang sangat penting untuk memfasilitasi tindakan kolektif, yaitu kepercayaan, jaringan dan lembaga baik formal maupun informal.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kualitatif dengan metode pengumpulan data utama studi riwayat hidup. Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan teknik bola salju (*snowball*) yang ditelusuri melalui petani yang tergabung dalam kelompok tani, lalu ditanyakan kepada siapa subyek penelitian menjual kopi yang telah dipanennya. Secara khusus dengan studi riwayat hidup ini diperoleh gambaran mendalam bagaimana tindakan kolektif

Tabel 1. Inisial dan Kategori Subyek Penelitian

Inisial Subyek Penelitian	Kategori Subyek Penelitian
WAN	Petani Kopi
SOL	Petani Kopi
TIN	Agan/Pedagang
RUS	Agan Layang TIO
EGI	Agan Layang SAB
SAB	Agan/Pedagang sekaligus Ketua Kelompok Tani
TIO	Agan/Pedagang sekaligus Ketua Kelompok Tani

yang dilakukan petani dan pedagang kopi dalam kelembagaan kelompok tani dalam menghadapi tuntutan pasar ekspor kopi. Dari hasil penelusuran tersebut, terpilih tujuh subyek penelitian dengan kategori petani kopi, agen layang dan agen/pedagang pengumpul sekaligus ketua kelompok tani (Tabel 1).

Untuk memperdalam analisis juga dilakukan wawancara mendalam dengan berbagai dinas instansi terkait seperti: Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun, Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS) serta pendamping eksportir (Indocafco).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Semangat Kolektivitas Lokal dan Munculnya Dilema Kolektivitas

Solidaritas diantara warga Nagori Sait Buttu Sariibu masih tergolong tinggi. Di Dusun Sait Buttu, Nagori Sait Buttu Sariibu hidup bersama antara muslim (sekitar 90 persen) dan non muslim/Kristen (sekitar 10 persen). Kedua entitas ini hidup dalam toleransi yang tinggi. Telah ada kesepakatan bersama, apabila ada babi terlepas di perkampungan dipastikan tidak akan kembali pada pemiliknya. Hingga kini tidak pernah ada kejadian ternak babi yang terlepas karena pemelihara babi menembok tinggi kandang babinya.

Semangat kolektivitas di tingkat lokal telah diretas sejak petani belum tergabung dalam kelompok tani. Petani di Nagori Sait Buttu Sariibu rata-rata bergabung dalam kelompok tani sejak tahun 2010. Petani memperoleh beberapa keuntungan dengan bergabung dalam kelompok tani. Utamanya pada bertambahnya wawasan mereka mengenai teknik budidaya kopi, pengolahan hingga pemasarannya. Manfaat lain adalah dapat mengakses berbagai bantuan dari pemerintah. Dilema kolektivitas muncul karena jumlah anggota kelompok tani yang besar (90 orang) berdampak pada kohesi sosial individu yang tergabung dalam kelompok semakin melemah. Kohesi sosial berbanding terbalik dengan jumlah individu yang menjadi anggota dalam kelompok tani. Semakin kecil jumlah anggota kelompok, maka kohesi sosial semakin kuat, dan sebaliknya. Semakin melemahnya kohesi sosial ditunjukkan dengan kesulitan mengakomodir kepentingan setiap individu yang jumlahnya besar. Interaksi diantara sesama anggota menjadi renggang dan diperlukan peran ketua kelompok tani sekaligus sebagai pemimpin untuk mengakomodir berbagai kepentingan individu dalam kelompok. Selama ini ketua kelompok tani yang sekaligus pedagang berasal dari etnis yang sama, memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang menjadi perekat sehingga kohesi sosial dapat dipertahankan.

Semangat kolektivitas lokal tercermin dalam kelembagaan *perwiridan*, untuk para laki-laki yang dilaksanakan setiap malam jumat pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB secara bergiliran, sedangkan perempuan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Acara *perwiridan* dimulai dengan pembacaan surat yasin, tahlil, membaca doa dan setelah doa disisipkan berbagai informasi kegiatan pemerintahan, misal: gotong royong, pengumuman calon penerima raskin hingga warga yang hendak menyelenggarakan hajatan. Setelah *perwiridan* hampir berakhir dilakukan pengumpulan infax dan dihitung perolehannya. Dana infax diberikan kepada yayasan Ar Ridho untuk dipergunakan membantu anak yatim, para mualaf dan warga yang tidak mampu (fakir). Pada saat awal terbentuknya yayasan Ar Ridho, infax yang terkumpul dipergunakan untuk membangun sarana fisik, dana pendidikan anak yatim dari

Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), menjelang lebaran dibagikan santunan berupa baju dan uang saku. Kepada fakir miskin diberikan dalam bentuk sembako. Jadi para fakir miskin setiap tahun mendapatkan sumbangan berupa zakat menjelang hari raya dan santunan dari yayasan Ar Ridho.

Migran Jawa yang lahir di Sumatera tergabung dalam lembaga *pujakesuma* (putera Jawa kelahiran Sumatera). Pujakesuma dapat mempererat tali silaturahmi diantara para warga Nagori Sait Buttu Saribu yang ada di Kecamatan Pamatang Sidamanik. Ikatan diantara sesama putra Jawa kelahiran Sumatera relatif kuat, terutama dalam saling bantu untuk mengatasi kesulitan. Semula Pujakesuma merupakan paguyuban suku Jawa di Sumatera. Pujakesuma bertahan hingga kini sebagai bentuk kerinduan masyarakat Jawa di perantauan akan budaya leluhurnya yang menjunjung tinggi kolektivitas lokal dan persaudaraan. Bentuk kolektivitas lokal ditunjukkan dengan kelompok arisan baik untuk laki-laki maupun perempuan yang dilaksanakan sebulan sekali secara bergilir dengan sistem undian (*cabut nomor*).

Pedagang kopi migran Jawa menunjukkan tindakan sosial dalam setiap transaksinya. Sebagaimana dicerminkan dalam tindakan sosial pedagang kopi arabika berinisial SAB yang memiliki 5 orang agen layang, salah satunya adalah adik kandungnya berinisial EGI. Apabila dengan 4 orang agen layang lainnya margin pembelian kopi arabika Rp 300,- per kg, maka dalam bertransaksi dengan EGI. SAB membeli kopi yang belum diolah dengan margin Rp 500,- hingga Rp 600,- per kg sebagaimana diungkapkan SAB:

*“Hanya dengan cara membeli kopi arabika dengan harga lebih tinggi daripada agen layang lain, saya bisa membantu adik kandung saya. Biasanya agen layang lain mendapat keuntungan dari kopi yang saya beli Rp 300,- per kg, adik saya bisa mendapatkan keuntungan antara Rp 500,- hingga Rp 600,- per kg”* (SAB, 49 tahun, agen/pedagang pengumpul, Ketua Kelompok Tani).

Tindakan sosial pedagang kopi SAB merupakan cerminan moral ekonomi pedagang. Di luar komunitasnya pedagang tetap menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dengan segala bentuk persaingan untuk bertahan (*survive*), namun di dalam komunitasnya tetap memegang moral ekonomi untuk tetap membantu para agen layang yang masih memiliki ikatan kekerabatan dengannya.

Kasus salah seorang anggota kelompok tani berinisial LUD yang merasa tidak mendapat keuntungan dengan bergabung dalam kelompok tani, lebih memilih berusaha sendiri dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari keanggotaan kelompok tani. Namun anggota tersebut mendapatkan hukuman moral dari anggota lainnya, karena dinilai lebih mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Sangsi moral yang diterima oleh LUD hanya dikucilkan dari aktivitas kelompok tani saja.

### Upaya Mengatasi Dilema Kolektivitas.

Teori tindakan kolektif dihadapkan pada potensi konflik manakala kepentingan individu dalam kelompok lebih dominan daripada kepentingan kelompok. Masalah akan muncul ketika individu mementingkan kepentingannya sendiri, yang diikuti oleh sejumlah individu dalam kelompok tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan insentif jangka pendek, sehingga

muncul dilema kolektivitas. Contoh dilema kolektivitas adalah individu tetap bertahan dalam kelompok sekalipun tahu peran dan korbanan setiap individu dalam kelompok berbeda. Terkadang ada dorongan dalam individu untuk keluar dari kelompok, saat individu menemukan jaringan pasar yang lebih menguntungkan karena memberikan harga jual lebih baik (lebih tinggi). Namun tidak dilakukan oleh individu yang tergabung dalam kelompok karena ada pertimbangan-pertimbangan sosial, seperti berbagai kemudahan saat bergabung dengan kelompok misal: pelatihan, praktek GAP dari pendamping eksportir, bantuan bibit kopi dari Dinas Perkebunan hingga bantuan sosial dari sesama petani saat salah satu anggota kelompok tertimpa kemalangan. Dan tak kalah pentingnya adalah solidaritas yang terjalin diantara sesama petani yang tergabung dalam kelompok yang tak dapat dihitng secara nominal. Artinya *bounded solidarity* dapat memperkuat individu untuk tetap berada dalam kelompok. Memecahkan dilema tindakan kolektif ini tidak mudah, karena selama keuntungan tidak diperoleh, individu lebih memilih untuk tidak bekerja sama dengan orang lain. Agar individu bertahan dalam kelompok, harus ada pemberian insentif. Pemberian insentif adalah penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh teori tindakan kolektif generasi pertama.

Salah satu bentuk insentif pada setiap individu yang tergabung dalam kelompok tani adalah jaminan pasar hingga bantuan dari pemerintah melalui kelompok. Namun penyelesaian masalah ini dikritik oleh teori tindakan kolektif generasi kedua, karena tidak seluruh individu yang tergabung dalam kelompok tani hanya memperhitungkan untung rugi semata. Ada tindakan-tindakan sosial yang didasari oleh moral yang membuat individu tetap bertahan dalam kelompok. Teori tindakan kolektif generasi pertama yang menganggap bahwa semua individu rasional ternyata tidak sepenuhnya benar. Faktanya tidak seluruh individu rasional. Banyak tindakan kolektif yang sudah tertanam (*embedded*)<sup>1</sup> dalam jaringan yang sudah ada dalam kelompok yang sedang berlangsung diantara individu. Teori tindakan kolektif generasi kedua mengakui adanya beberapa individu yang tidak rasional, karena tindakannya dilandasi oleh motivasi sosial. Hasil penelitian ini memperkuat teori tindakan kolektif generasi kedua, dimana masalah dilema kolektivitas dapat “dijinakkan” dengan memperkuat kepercayaan (*trust*) diantara individu yang tergabung dalam kelompok tani maupun antar aktor dalam setiap rantai pemasaran kopi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa berbagai bentuk modal sosial dapat meningkatkan kepercayaan di antara orang-orang sehingga berkembang dari kerjasama menjadi tindakan kolektif. Modal sosial memberikan pemahaman bagaimana budaya, aspek sosial dan kelembagaan masyarakat dalam berbagai ukuran bersama-sama mempengaruhi kemampuan mereka menangani masalah-masalah tindakan kolektif. Prinsip-prinsip mendasar modal sosial dengan unsur utama kepercayaan inilah yang dapat “menjinakkan” dilema kolektivitas yang dihadapi petani kopi tanpa mengesampingkan peran norma dan nilai-nilai kerjasama, resiprositas dan solidaritas diantara anggota kelompok.

Realitas di lapang juga menunjukkan bahwa individu yang tergabung dalam kelompok tani memiliki preferensi yang sangat heterogen. Yang penting adalah bagaimana mengenali kepercayaan, mendefinisikan preferensi individu yang konsisten dengan prasyarat kerjasama. Berbagai bentuk modal sosial yang berkontribusi terhadap suksesnya tindakan kolektif selalu dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan di antara para aktor. Peningkatan kepercayaan diantara aktor di tingkat lokal ditunjukkan dengan semakin besarnya volume

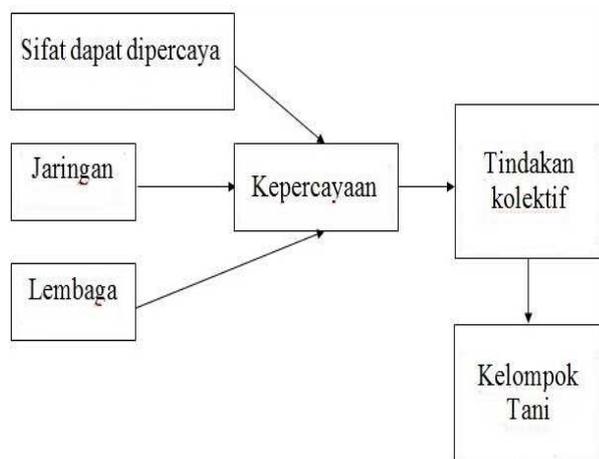
1. Konsep keterlekatan (*embedded*) ini dibahas dalam literatur Granovetter (1985; 2005).

penjualan kopi arabika dari petani kepada agen layang dan dari agen layang kepada agen tingkat desa, tanpa menuntut kehadiran petani secara fisik karena peningkatan kepercayaan antar aktor sebagai dampak transaksi yang berulang. Ketaatan setiap aktor dalam bertransaksi terjadi karena aktor tidak siap menerima sanksi moral (dikucilkan) apabila curang dalam bertransaksi, misalnya mengurangi timbangan. Kepercayaan menjadi tautan utama antara modal sosial dan tindakan kolektif dalam pemasaran kopi arabika. Kepercayaan ditingkatkan ketika individu dapat dipercaya membentuk jaringan satu sama lain dan berada dalam institusi yang menghargai perilaku jujur. Kepercayaan sekaligus menjadi hasil dari bentuk modal sosial yang menghubungkan dengan tindakan kolektif karena adanya kepercayaan di antara sekelompok individu sering dapat dijelaskan sebagai akibat dari bentuk-bentuk modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan lembaga.

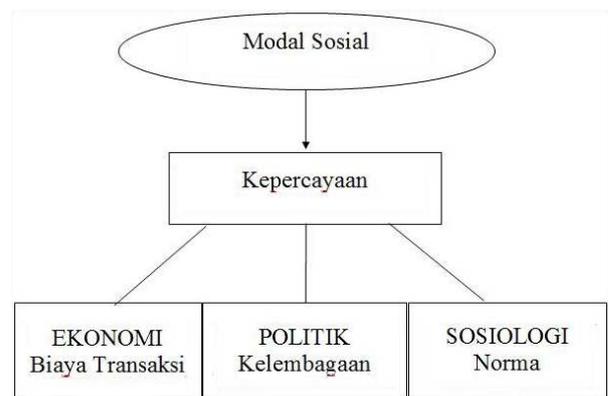
Kepercayaan diantara individu yang tergabung dalam kelompok tani ini diwujudkan dalam kerjasama yang terjalin antara petani kopi dengan agen/pedagang sekaligus ketua kelompok tani dalam kegiatan pengolahan kopi, seperti digambarkan oleh WAN berikut ini:

*“Saat ke kebun untuk memanen kopi, saya tidak perlu gelisah saat menjemur kopi yang sudah saya olah, karena Pak SAB akan membantu mengangkat kopi yang saya jemur, bahkan menimbang sekalipun tidak perlu saya tungguin. Saya percaya dengan hasil timbangan yang dilakukan oleh Pak SAB, karena ketetangaan yang sudah terjalin sejak lama”* (WAN, 43 tahun, petani kopi).

Ungkapan IWT menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin dengan ketua kelompok tani sekaligus pedagang berdasar kepercayaan, jaringan ketetangaan dan kelembagaan kelompok tani. Kepercayaan menjadi syarat untuk bekerjasama (Ostrom, 2010). Hasil penelitian ini memperkuat tesis bahwa bentuk-bentuk modal sosial seperti kepercayaan, jaringan hingga lembaga dapat mengatasi masalah dilema kolektivitas yang dihadapi individu dalam kelompok tani (Gambar 1). Kepercayaan sebagai dasar modal sosial (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995). Berbeda dengan Coleman (1990) yang menyatakan jaringan sebagai dasar modal sosial. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mengatasi dilema kolektivitas bukan hanya dapat dilakukan dengan memperkuat kepercayaan (*trust*) semata, namun juga dengan mengembangkan resiprositas, memperkuat norma yang disepakati kelompok serta memperkuat solidaritas diantara anggota kelompok sehingga jaringan semakin kuat.



Gambar 1. Kepercayaan (*Trust*) Untuk Mencapai Tindakan Kolektif



Gambar 2. Modal Sosial Dioperasionalisasikan dengan Kepercayaan (*trust*) Dalam Tiga Disiplin yaitu Ekonomi, Politik dan Sosiologi.

Penelitian ini memberi gambaran solidaritas di tingkat mikro sedangkan gambaran solidaritas ekonomi di tataran makro dapat ditelusuri dari pemikiran Benjamin Jr dalam artikel berjudul *‘State of the art of Social Solidarity Economy in Asia’*. Social Solidarity Economy (SSE) merupakan sistem ekonomi yang dikembangkan oleh orang-orang yang terpinggirkan oleh kapitalis global dan menjadi alternatif ekonomi pasar neoliberal. Dalam SSE bekerja norma-norma sosial, dan etika yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam transaksi. Transaksi ekonomi dipandu oleh nilai-nilai sosiologis maupun hubungan politik. (DeLong, 1997; Benjamin Jr, 2013). Jadi solidaritas ekonomi berkaitan dengan kegiatan ekonomi koperasi dan inisiatif untuk berbagi seperangkat nilai-nilai seperti: kerjasama dan manajemen partisipatif dari anggota kelompok (Benjamin Jr, 2013). Studi mikro ini memperkuat hipotesis dalam dimensi makro sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin Jr (2013) dimana sistem ekonomi yang berciri Asia yang berkaitan dengan budaya Asia (dilandasi moral dan basis solidaritas) sangat kental ciri tindakan kolektifnya.

Pembahasan tentang tindakan kolektif berkaitan dengan modal sosial (Koutsou, *et al*, 2014). Modal sosial melekat pada struktur hubungan masyarakat (Portes, 1998). Modal sosial dapat dipahami dalam dimensi ekonomi, sosial dan politik sebagaimana dinyatakan Anheier and Kendall (2000: 14) dalam *Handbook of Social Capital The Troika of Sociology, Political Science and Economic*.

Gambar 2 memperlihatkan modal sosial dioperasionalisasikan dengan kepercayaan (*trust*) dalam Tiga Disiplin (Ekonomi, Politik dan Sosiologi). Dalam disiplin ekonomi dioperasionalkan dalam biaya transaksi, dari sisi politik ditinjau dari aspek kelembagaan (institusi) dan dari disiplin sosiologi dioperasionalisasikan dengan konsep norma<sup>2</sup>. Tiga parameter modal sosial menurut Fukuyama (1999) adalah kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan juga jaringan-jaringan (*networks*). Kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Norma-norma dalam kelompok tani ini pula yang dianut oleh individu yang tergabung dalam kelompok tani kopi di Pamatang Sidamanik

2. Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar tertentu misalnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Fukuyama, 1999).

Penelitian ini memperkuat hasil studi Beard dan Dasgupta (2006) yang membandingkan tindakan kolektif di perkotaan dan di pedesaan pada lokasi program pengentasan kemiskinan yang mewujudkan dalam konsep pembangunan berbasis komunitas (*community-driven development*). Penelitian Beard dan Dasgupta (2006) dilakukan di tujuh lokasi dengan karakteristik 3 (tiga) lokasi berciri komunitas desa, 1 (satu) lokasi berciri semi desa/semi kota dan 3 (tiga) lokasi berciri komunitas perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas komunitas untuk menjalankan tindakan-tindakan kolektif (*collective action*) merupakan kunci dari keberhasilan konsep pembangunan berbasis komunitas. Kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Beard dan Dasgupta (2006) berguna untuk memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindakan kolektif di masyarakat di wilayah Indonesia. Tindakan kolektif di tingkat komunitas bekerja karena perpaduan faktor sosial, politik dan historis baik dari sisi internal dan eksternal dari komunitas yang bersangkutan. Pembangunan berbasis komunitas berkaitan dengan kapasitas komunitas untuk menjalankan tindakan kolektif. Untuk mewujudkan tindakan kolektif, dibutuhkan daya kohesi komunitas, relasi sosial yang stabil, dan adanya hierarki yang berdasar sosial dan kelas, saling kepercayaan (*belief*) dalam relasi yang saling tergantung. Namun berbeda dengan studi Beard dan Dasgupta (2006), hasil penelitian menunjukkan bahwa daya kohesi komunitas petani kopi arabika diikat oleh basis etnisitas migran Jawa di Simalungun Sumatera Utara yang kental, yang berjuang untuk dapat bertahan dalam kondisi geografis yang berbeda dengan tempat asalnya.

Basis etnisitas migran Jawa yang kental ini ditunjukkan dalam sejarah terbentuknya dusun (Huta). Nagori Sait Buttu Saribu terbagi dalam tujuh huta, dua diantaranya adalah Huta Sait Buttu dan Huta Manik Saribu. Huta Sait Buttu dominan etnis Jawa yang mayoritas beragama Islam, sebaliknya dengan Huta Manik Saribu dominan etnis Batak yang beragama Kristen Protestan/Katolik. Berdasar Profil Nagori Sait Buttu Saribu tahun 2014, jumlah pemeluk agama Islam 3.024 orang dan Kristen 2.444 orang. Bentuk dan pola pemukiman yang menyatu berdasar etnis di tingkat dusun ini memperkuat kohesi sosial yang terbentuk antar petani kopi. Kedua etnis hidup berdampingan, dan selama ini tidak ada konflik berarti diantara keduanya. Bahkan kedua etnis sudah berbaur dalam ikatan perkawinan. Pemeliharaan babi oleh etnis Batak dilakukan dengan mengandangkan babinnya agar tidak mengganggu etnis Jawa dalam beribadah. Artinya selama ini toleransi antar etnis terbina dengan baik.

Etnis Jawa belajar berbudidaya kopi arabika dari etnis Batak, dan membeli kebun kopi secara bertahap dari hasil bekerja sebagai karyawan dan buruh di perkebunan teh Tobasari dari etnis Batak. Sebaliknya etnis Batak belajar ketekunan, keuletan, kesabaran dan hemat dari etnis Jawa. Filosofi Jawa dengan pola hidup *gemi nastiti ngati ati* (hemat, cermat dan bersahaja/berhati-hati) melekat dalam diri migran Jawa. Tindakan hemat dilandasi oleh perhitungan bahwa mengumpulkan harta tidak mudah, untuk membeli lahan secara bertahap dilakukan dengan memeras keringat sehingga hidup bermewah-mewahan, boros serta menghamburkan uang sangat bertentangan dengan sikap hidup hemat (*gemi*). *Nastiti* berkaitan dengan pemakaian harta yang telah diperoleh, sehingga *gemi nastiti* bukanlah bermakna pelit, bakhil dan tamak, namun tidak ceroboh dalam menggunakan harta. Sikap hati-hati dalam menggunakan harta diyakini dapat menghindarkan diri dari kesengsaraan hidup.

Kehidupan etnis migran Jawa yang terbiasa dengan *selamatan* pun dipertahankan. *Selamatan* merupakan sedekah makanan

untuk meningkatkan rasa kekeluargaan diantara para tetangga. *Selamatan* berkaitan dengan siklus hidup manusia sejak hamil (*selamatan* tujuh bulanan), lahir, potong rambut, sunat, kematian hingga *selamatan* yang berkaitan dengan peristiwa khusus seperti: membangun dan menempati rumah baru. *Selamatan* mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, senasib dan sepenanggungan dalam berusaha untuk kebahagiaan hidup bersama. Artinya sekalipun kopi arabika sudah mencapai pasar dunia, namun nilai-nilai kehidupan tradisional petani kopi masih dipertahankan hingga kini sehingga memperkuat kohesi sosial diantara petani kopi di Nagori Sait Buttu Saribu.

Beberapa faktor yang turut berperan sebagai katalis tindakan kolektif sehingga dilema kolektivitas dapat diminimalisir adalah: tindakan kolektif dalam kelembagaan kelompok tani dapat memperkecil biaya transaksi yang tinggi, adanya dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun, dukungan dari pihak luar yaitu perusahaan swasta (eksportir) bernama Indocafco yang menerjunkan pendamping dari sisi teknis budidaya kopi arabika; keterkaitan dengan pelaku di luar komunitas petani kopi yang menyediakan informasi, keahlian hingga sumber daya keuangan, serta memfasilitasi aturan internal agar lebih efektif dan lebih murah, hingga proses pengolahan kopi untuk meningkatkan nilai tambah.

Jadi penelitian ini memperkuat hasil studi Devaux A., *et al.* (2009) yang mengidentifikasi beberapa faktor yang memfasilitasi kemunculan dan perkembangan tindakan kolektif untuk pemasaran produk dan peningkatan nilai tambah; Kruijssen *et al.* (2009) membahas pentingnya tindakan kolektif dalam konteks partisipasi petani dalam kegiatan pemasaran produk. Kruijssen *et al.* juga menunjukkan bagaimana kelompok wanita terlibat dalam pengolahan buah-buahan tropis di Thailand mampu membeli peralatan berharga karena dengan pengolahan produk dapat meningkatkan nilai tambah, mencapai harga yang lebih baik dan mengembangkan peluang pasar baru. Demikian pula pada hasil studi Markelova *et al.* (2009) pada kasus petani kentang di Uganda, dimana dengan didirikannya koperasi dapat mengumpulkan sumber daya keuangan dari tabungan pribadi dan pinjaman dari kelompok. Artinya tindakan kolektif dapat mengurangi biaya transportasi sehingga memungkinkan petani kentang yang terpencil dapat mengakses pasar. Gambaran yang sama juga ditunjukkan oleh kelompok tani di Tanzania (Barham J and Clarence C, 2009).

Tindakan kolektif petani kopi arabika di Simalungun Sumatera Utara dapat membuka peluang pemasaran baru bagi petani kopi dengan memperkenalkan inovasi melalui pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah melalui strategi *branding* yaitu kopi arabika Simalungun (Gambar 3). Strategi *branding* (*brand strategy*) juga ditunjukkan dalam studi Markelova *et al.* (2009) dengan produk kentang dari Andean yang diproduksi dengan *branding* kentang chip.



Gambar 3. Kopi Arabika Simalungun

Untuk mengakses pasar, petani kopi arabika harus tergabung dalam kelompok tani karena sebagian besar pembeli lebih memilih untuk bertransaksi dengan petani menengah dan besar (para pedagang). Artinya tindakan kolektif dalam bentuk kelembagaan kelompok tani dapat membantu petani untuk memenuhi persyaratan ketat yang diajukan oleh pasar. Gambaran yang sama pada kelompok produsen kentang di Uganda yang memanfaatkan tumbuh suburnya makanan cepat saji sebagai calon pembeli lain di pasar domestik sehingga memungkinkan petani untuk mencapai kualitas dan volume yang memenuhi persyaratan pembeli (Kaganzi *et al*, dalam Markelova *et al*, 2009). Kemudahan mengakses pasar setelah bergabung dalam gabungan kelompok tani juga dirasakan oleh petani kentang di Malawi (Mudege, *et al*, 2015).

Studi ini sekaligus memperkuat tesis Markelova *et al*, (2009), dimana eksportir lebih memilih bekerja dengan kelompok produsen karena dinilai lebih mampu menyediakan pasokan yang stabil dari kualitas produk dibanding petani secara individu. Petani memerlukan banyak insentif untuk memenuhi permintaan eksportir karena mereka menawarkan pasar yang stabil dengan keuntungan yang baik sekalipun dengan persyaratan kualitas ketat dan persyaratan keamanan pangan dari pada pasar ekspor. Pencarian pasar memerlukan biaya, sehingga dengan tindakan kolektif petani dapat mengurangi biaya pencarian pasar.

Jadi tindakan kolektif disini lebih dimaknai sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan basis kelembagaan kelompok tani. Tujuan bersama dapat dicapai dengan pengembangan modal sosial (Koutsou, *et al*, 2014). Faktor yang mempengaruhi tindakan kolektif adalah peran dalam kelompok, pendidikan petani, besarnya biaya transaksi dan kualitas kopi terkait dengan cara petani mengolah kopi pada pasca panen. Sistem insentif untuk meningkatkan kualitas kopi rakyat agar memiliki daya saing tinggi dalam aspek tataniaga adalah sinergi peran pemerintah dan eksportir melalui media kinerja kelompok dan kolektivitas petani. Peran pemerintah melalui insentif alat perlu diimbangi kemitraan dengan eksportir dan dukungan kinerja kelompok dan tindakan kolektif petani.

Untuk meminimalisir dilema kolektivitas, negara harus hadir dengan kebijakan berupa subsidi atau proteksi yang berpihak pada petani kopi namun baik subsidi maupun proteksi tersebut diarahkan untuk dapat meningkatkan kemandirian kelompok petani kopi. Selama ini bantuan dari pemerintah berupa pemberian bantuan peralatan pengolah kopi dan pemberian tanaman lamtoro untuk pelindung atau naungan kopi agar produktivitas kebun kopi dalam jangka panjang tetap terjaga. Pelindung atau naungan kopi berupa Lamtoro PG79 diberikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun pada tahun 2013. Jenis tanaman lainnya yang dapat dijadikan penangung kopi adalah mahoni, sengon, durian, jengkol dan mangga namun yang paling baik adalah lamtoro. Namun bantuan pemerintah tersebut masih bersifat insidental. Diperlukan program yang berkelanjutan, untuk memotivasi petani kopi guna kelangsungan usahanya menuju ke arah kemandirian kelompok. Bantuan pemerintah yang lainnya dapat diberikan dalam bentuk pelatihan dinamika kelompok tani, studi banding ke lokasi usaha kopi yang telah berhasil, menghubungkan petani kopi dengan jaringan pemasaran yang lebih luas serta memberi kesempatan pada petani kopi untuk ikut dalam berbagai macam pameran yang diinisiasi oleh pemerintah.

Beberapa jenis pelatihan yang pernah diikuti oleh petani kopi di Nagori Sait Buttu Saribu adalah pelatihan pembibitan kopi arabika pada tahun 2011 yang dilaksanakan di Simpang

Bage Simalungun Medan selama 1 hari, pelatihan pembuatan kompos yang dilaksanakan pada tahun 2015 dengan nara sumber dari agronomis Indocafco. Dalam pelatihan pembuatan kompos tersebut diikuti kelompok tani Simanja berjumlah 16 orang perempuan. Dari aspek pengolahan kopi, petani kopi memperoleh pelatihan pembuatan bubuk kopi dari tenaga ahli Indocafco. Intervensi berupa pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan lebih banyak diperoleh petani kopi dari swasta/indocafco dibandingkan dari pemerintah.

Selama ini pendekatan pemerintah dalam mengintroduksi berbagai program bidang perkebunan selalu kelompok. Namun untuk mengakses berbagai permodalan, persyaratan yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah kelompok harus sudah menjadi koperasi dan berbadan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ibu ROS berikut:

*“Hanya petani kopi yang tergabung dalam koperasi dan telah berbadan hukum yang dapat memanfaatkan permodalan dari Dinas Koperasi. Bukan hanya permodalan saja, kelompok tani yang sudah menjadi koperasi juga dapat mengakses pelatihan tentang kewirausahaan yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi”* (ROS, 47 tahun, Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun).

Uraian di atas menunjukkan bahwa sekalipun harga kopi ditentukan oleh pasar, namun negara harus tetap hadir agar transaksi di pasar berkeadilan. Pasar berkeadilan dicirikan oleh aktor yang melakukan tindakan besar memperoleh bagian yang besar pula dalam setiap transaksi. Dalam penelitian ini pasar menjadi instrumen dan menunjukkan bahwa petani tidak anti pasar, namun pasar dengan segala tuntutan selalu dihadapi petani. Untuk mewujudkan ekonomi pasar yang berkeadilan maka ekonomi pasar harus dikombinasikan dengan kecerdasan kolektif yang *genuine*-nya tergantung pada masing-masing negara karena teori dan strategi pembangunan negara maju tidak dapat diadopsi tanpa koreksi atau penyesuaian dengan kondisi riil negara berkembang seperti Indonesia, sehingga memunculkan lahirnya teori heterodoks (menyempal)<sup>3</sup>. Untuk asas ekonomi Indonesia, sebagaimana diusulkan Damanhuri (2009:113) adalah ekonomi kekeluargaan yang bersifat modern dan ekonomi pasar yang berkeadilan sosial.

Dalam paradigma pengembangan komunitas berbasis ekonomi lokal, pada dasarnya pasar netral dan menjadi ruang pertemuan bagi petani dan pedagang. Konsep ekonomi lokal dalam penelitian ini dimaknai sebagai ekonomi yang *“local genuine”* yang mampu bertahan di era globalisasi. Ada proses kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (petani kopi) untuk membentuk kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi daerah (yaitu kopi arabika). Menurut Arsyad (1999), fokus pengembangan ekonomi lokal adalah: (1) pemasaran dan ekspor, (2) pengembangan klaster (*cluster development*), (3) kemitraan stakeholders dan (4) pemberdayaan. Ekonomi lokal dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai gejala yang

3. Teori Heterodoks adalah teori yang menyempal dari teori liberal dan radikal, dengan ciri-ciri: (1) selalu menyesuaikan dengan realitas yang ada di negara berkembang, sehingga kondisi Negara Industri Maju (NIM) tidak bisa menjadi referensi dari adanya pembangunan ekonomi di Negara Sedang Berkembang (NSB); (2) mengakui kebudayaan, agama dan nilai-nilai lokal; (3) Adanya sinkronisasi antara nilai-nilai modern dengan nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai lokal. Di satu sisi teori ini berusaha melestarikan nilai-nilai lokal yang sudah ada, namun di sisi lain tetap mampu menyerap perkembangan modern yang ada; (4) Adanya peran penting dari UKM dan LSM lokal sebagai penggerak dalam keberhasilan pembangunan ekonomi (Damanhuri, 2010:62).

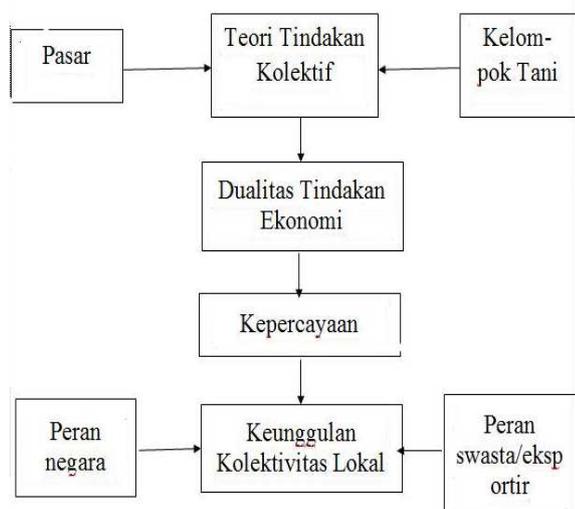
hanya terjadi di level mikro atau lokal namun berkaitan dengan sistem perekonomian di semua aras baik lokal, nasional, maupun global karena komoditas kopi arabika sudah terintegrasi dalam pasar ekspor.

Dengan pasar yang berkeadilan harapan untuk membangun ekonomi kopi Simalungun dapat terwujud untuk kesejahteraan petani kopi. Untuk menyejahterakan petani kopi, baik petani, negara dan pedagang harus berperan sesuai dengan porsi masing-masing. Pemerintah sebagai representasi negara berfungsi sebagai pengawal transaksi di pasar.

Lalu bagaimana dengan peran perusahaan? Selama ini perusahaan (yaitu Indocafco) telah memberikan pendampingan secara teknis kepada kelompok tani untuk menghasilkan mutu kopi sesuai tuntutan pasar ekspor. Pendampingan diberikan mulai dari: teknik budidaya kopi dengan pendampingan langsung dari para agronomis Indocafco hingga petani kopi memperoleh sertifikasi. Hingga kini jumlah petani kopi yang telah tersertifikasi sebanyak 500 orang petani. Petani yang mendapatkan sertifikasi adalah petani yang menjual kopi hasil panennya kepada *collector* binaan Indocafco, petani yang tergabung dalam kelompok tani serta petani kopi yang sudah mempraktekkan *Good Agricultural Practice* (GAP). Indocafco juga memberikan seperangkat sarana untuk keamanan kerja seperti: mantel, masker, sepatu *boot*, pangkas dan gunting untuk perawatan tanaman kopi.

Penerapan praktik *Good Agricultural Practice* (GAP) dimulai dari tahapan: pembibitan; pemangkasan (*pruning*), pengelolaan tanaman penauang (*shade tree management*), pemanenan terbaik (*best harvesting*), pengolahan (*processing*) hingga proses pencucian dan pengeringan (*washing and drying process*) hingga pengelolaan tanah (*soil management*). Inti dari penerapan GAP adalah kesadaran petani sebagaimana dikemukakan oleh DED berikut:

*“Awal pelatihan adalah merubah mindset petani dengan kesadaran. Pada awal pertemuan saya tanyakan apakah bapak ibu pernah melakukan pemupukan kopi. Sebagian besar peserta pelatihan menjawab “tidak”. Lalu saya sampaikan pemetikan kopi yang dilakukan terus menerus tanpa ada upaya perawatan sama artinya dengan memperkosa kopi. Hingga akhirnya petani kopi menjadi sadar bahwa tanaman kopi tidak hanya dipetik hasilnya, namun perlu dirawat”* (DED, 26 tahun, koordinator agronomis Indocafco).



Gambar 4. Keunggulan Kolektivitas Lokal

Sekalipun telah mempraktekkan GAP, namun petani masih menggunakan pupuk organik dan kimia, karena dari hasil penelitian para agronomis Indocafco tanah di Simalungun masih memerlukan hara, sehingga pemakaian pupuk kimia masih ditolerir. Pupuk organik masih tetap dipakai berbarengan dengan pupuk kimia. Untuk menekan penggunaan pupuk kimia, petani kopi telah dilatih Indocafco untuk membuat pupuk kompos dengan memanfaatkan limbah dari kulit kopi (yang dinilai mengandung hara tinggi) namun selama ini belum banyak dimanfaatkan untuk kompos.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah untuk melakukan tindakan kolektif dan meminimalisir dilema kolektivitas, kelembagaan kelompok tani juga harus memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) jumlah anggota kelompok tidak terlalu besar karena jumlah anggota yang terlalu besar mengakibatkan daya kohesi antar anggota makin melemah. Jumlah anggota kelompok yang kecil juga lebih mudah mengatur anggota kelompok serta lebih mudah mengatasi *free rider*; (2) kelompok tani dibentuk berdasar kedekatan tempat tinggal (domisili) sehingga ikatan yang terjalin diantara anggota berbasis ketetanggaan yang kuat; (3) ketua kelompok tani juga menjadi pedagang yang membeli kopi hasil olahan anggotanya karena peran rangkap tersebut menjadi cerminan moral ekonomi pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih *fair* dan adil. Pedagang melaksanakan berbagai kewajiban moral karena berasal dari entitas yang sama dengan petani kopi arabika. Contoh tindakan yang merupakan cerminan moral adalah menjelang lebaran pedagang membagikan sirup dan gula pasir kepada petani kopi yang menjadi langganannya; (4) pemberian insentif yang berkeadilan. Adil dimaknai bahwa siapa yang berkontribusi lebih besar harus mendapat bagian yang lebih besar pula.

Untuk mengatasi dilema kolektivitas yang dihadapi petani dalam menghadapi pasar ekspor kopi diperlukan sinergitas antara petani kopi, pemerintah dan swasta (eksportir) (Gambar 4). Sinergi antara kepercayaan dan kekuasaan berguna untuk membangun hubungan sosial yang kuat di pedesaan (Graham, S, 2014). Peran negara melalui kebijakan pembangunan pedesaan harus berubah dari atas (*“from above”*) menjadi dari bawah (*“from below”*) (Koutsou, et al, 2014).

Pemerintah (cq. Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun) sebagai representasi negara berperan melalui serangkaian kebijakan untuk membantu petani kopi baik dari aspek budidaya hingga pemasaran dalam kelembagaan kelompok tani. Beberapa kebijakan tersebut adalah: pemberian bantuan peralatan pengolah kopi (berupa: pulper, huller, roaster, alat sortasi), pemberian tanaman lamtoro untuk pelindung atau naungan kopi dan bibit kopi. Intervensi pemerintah berupa pembentukan lembaga Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS) pada akhir tahun 2012 guna memutus mata rantai tata niaga kopi yang panjang hingga kini belum mencapai hasil yang memuaskan. HMKSS beranggotakan kelompok tani, pengolah kopi arabika, pedagang serta pengusaha.

Swasta (Indocafco) menjalankan peran sebagai wujud perhatiannya pada petani kopi (*people*) dan lingkungan (*planet*), bukan hanya mengejar keuntungan (*profit*) semata. Program dari Indocafco untuk petani kopi tidak diberikan dalam bentuk uang, namun berbagai pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia seperti: praktik GAP, pembuatan kompos, pemberian sertifikasi hingga seperangkat sarana untuk keamanan kerja.

Sekalipun petani kopi arabika telah mendapatkan manfaat dari pemerintah maupun swasta, namun bantuan hanya sebagai stimulan saja menuju kemandirian. Untuk mencapai

kemandirian dilakukan melalui proses pemberdayaan dan partisipasi dalam setiap tahapan pengembangan ekonomi lokal melalui sinergi tiga pihak yaitu masyarakat, negara dan swasta.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Teori tindakan kolektif dapat dipergunakan untuk menjelaskan sistem ekonomi yang berciri Asia, karena terkait dengan budaya ketimuran (dilandasi moral). Tindakan kolektif dimaknai sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Pembahasan tindakan kolektif erat kaitannya dengan modal sosial. Modal sosial menjadi faktor yang menjadi penyebab dan hasil tindakan kolektif. Teori tindakan kolektif memberikan dasar analisis lebih lanjut untuk modal sosial pada penelitian di masa depan. Ke depan masih terbuka luas peluang untuk meneliti modal sosial dengan analisis teori tindakan kolektif pada komunitas selain petani kopi beserta praktek terbaik (*best practice*)-nya dengan basis etnis yang berbeda. Karena diyakini bahwa setiap etnis memiliki nilai budaya lokal yang berbeda dengan etnis lain.

Pasar mengharap individu saling berkompetisi, sementara struktur yang dipersiapkan oleh pemerintah (*state*) adalah petani kopi harus menjalankan usahanya secara berkelompok dalam wadah kelompok tani. Apabila di pasar aktor secara individu harus bersaing dengan kekuatan kapital yang dimilikinya, di sisi lain petani kopi harus kuat secara kolektivitas untuk menghadapi pasar global (ekspor kopi). Akibatnya dalam diri petani hadir secara bersama-sama tindakan rasional formal dan tindakan rasional moral (rasionalitas substantif) sehingga muncul dilema kolektivitas. Penelitian ini memperkuat tesis Kalberg, S (1980) yang menyatakan bahwa tindakan aktor tidak dapat berlandaskan rasional formal maupun rasional moral saja, namun berada diantara keduanya.

### Saran

Untuk mengatasi dilema kolektivitas dapat memperkuat unsur-unsur modal sosial, terutama meningkatkan kepercayaan (*trust*) diantara sesama anggota kelompok tani. Tindakan kolektif dalam kelembagaan kelompok tani kopi berperan positif dalam meningkatkan akses petani ke pasar, mendapatkan harga yang lebih baik, mengurangi biaya transaksi dan membantu petani beradaptasi dengan tuntutan pasar. Diperlukan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha/swasta/eksportir dan petani kopi untuk mencapai keunggulan kolektivitas lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Barham J and Clarence C. 2009. *Collective Action Initiatives To Improve Marketing Performance: Lessons From Farmer Groups In Tanzania*. Food Policy 34 (2009) 53–59. journal homepage: [www.elsevier.com/locate/foodpol](http://www.elsevier.com/locate/foodpol)
- Beard, Victoria A. and Dasgupta Aniruddha. 2006. *Collective Action and community-driven Development in Rural and Urban Indonesia*. Urban Studies, Vol. 43, No. 9, 1451–1468, August 2006. Sage Publication and Urban Studies Journal Limited.<http://usj.sagepub.com/cgi/content/abstract/43/9/1451>
- Benjamin, R Quinones Jr. 2013. *State of the art of social solidarity economy in Asia*. Presented at the 5<sup>th</sup> RIPES International Meeting of Social Solidarity Economy. University of the Philippines, Diliman, Quezon City. October 15, 2013.
- Coleman, J., 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Harvard University press.
- Damanhuri, D.S. 2009. *INDONESIA: Negara, Civil Society dan Pasar dalam Kemelut Globalisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Damanhuri, D.S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan. Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Data Dasar Profil Nagori Sait Buttu Saribu Tahun 2014
- Davis, Peter, Rafiqul Haque, Dilara Hasin, and Md. Abdul Aziz. 2009. *Everyday Forms of Collective Action in Bangladesh: Learning from Fifteen Cases*. CAPRI Working Paper No. 94. International Food Policy Research Institute: Washington,DC. <http://dx.doi.org/10.2499/CAPRIWP94>.
- DeLong-Landsberg, Martin. 1997. *Capitalist Globalization: Consequences, Resistance, and Alternatives*. NY: Monthly Review Press.
- Devaux A.,*et.al.* 2009. *Collective Action For Market Chain Innovation In The Andes*. Food Policy 34 (2009) 31-38 journal homepage: [www.elsevier.com/locate/foodpol](http://www.elsevier.com/locate/foodpol)
- Dewey, J. 1998. *Budaya dan Kebebasan: Ketegangan Antara Kebebasan Individu Dan Aksi Kolektif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan dari buku berjudul *Freedom and Culture*
- Fukuyama, F., 1995. *Trust*. New York: The Free Press.
- Fukuyama, F. 1999. *Social Capital and Civil Society*. IMF Conference on Second Generation. George Mason University, October 1, 1999.
- Graham, S. 2014. *A New Perspective on The Trust Power Nexus from Rural Australia*. Journal of Rural Studies 36 (2014), pages 87-98. Journal homepage [www.elsevier.com/locate/jrurstud](http://www.elsevier.com/locate/jrurstud)
- Granovetter, M. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness". American Journal of Sociology". Vol. 91, pp.481-510.
- Granovetter, M. 2005. *The Impact of Social Structure on Economic Outcomes*. Journal of Economic Perspectives. Vol.19. Number 1.
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa. Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Terjemahan dari judul asli: *Asian Village Economy at the Crossroads. An Economic Approach to Institutional Change*. 1981. University of Tokyo Press. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hellin, J. *et al.* 2009. *Farmer Organization, Collective Action and Market Access in Meso-America*. Food Policy 34, 16-22. International Food Policy Research Institute (IFPRI). 67. Diakses dari laman: <http://www.ifpri.org/publication/farmer-organization-collective-action-and-market-access-meso-america>.
- Herman. 2003. *Membangkitkan Kembali Peran Komoditas Kopi Bagi Perekonomian Indonesia*. <http://www.perkopiandunia.htm>. diakses pada 8 Januari 2015.
- Kalberg, Stephen. 1980. *Max Weber's Types of Rationality : Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History*. American Journal of Sociology, Volume 85, Issue 5 (Mar., 1980), 1145-1179.

- Koutsou, S. *et al.* 2014. *Young Farmers' Social Capital in Greece: Trust Levels and Collective Actions*. Journal of Rural Studies 34 (2014) Pages 204-211. Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/jrurstud](http://www.elsevier.com/locate/jrurstud)
- Kruijssen *et al.* 2009. *Collective action for small-scale producers of agricultural biodiversity products*. Food Policy 34 (2009) 46–52 journal homepage: [www.elsevier.com/locate/foodpol](http://www.elsevier.com/locate/foodpol)
- Markelova, Helen, Ruth Meinzen-Dick, Jon Hellin, Stephan Dohrn. 2009. Elsevier. *Collective Action for Smallholder Market Access*. Food Policy 34 (2009) 1-7.
- Meinzen-Dick, R., Di Gregorio, M., 2004. *Collective Action and Property Rights for Sustainable Development*. 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment. Focus 11, Brief 1. IFPRI, Washington, DC.
- Mudege, N.N *et al.* 2015. *Understanding Collective Action and Women's Empowerment in Potato Farmer Groups in Ntcheu and Dedza in Malawi*. Journal of Rural Studies 42 (2015) Pages 91–101. Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/jrurstud](http://www.elsevier.com/locate/jrurstud)
- Najiati, S dan Danarti. 2001. *Kopi Budidaya Dan Penanganan Lepas Panen*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Oslon, M. 1965. *The Logic of Collective Action*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Olson, M. 2002. *The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Ostrom, E and T.K.Ahn. 2009. The Meaning of Social Capital and Its Link to Collective Action. *Handbook of Social Capital. The Troika of Sociology, Political Science and Economics*. Gert Tinggaard Svendsen and Gunnar Lind Haase Svendsen (Editors). UK: Edward Elgar.
- Ostrom, E., 2010. *Analyzing Collective Action*. Agric. Econ. 41, pages 155-166.
- Portes, A., 1998. *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. Annu. Rev. Sociol. 24, 1-24.
- Putnam, R., 1993. *Making Democracy Work*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Ritzer, G and Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Mulia. Terjemahan dari *Modern Sociological Theory* (Ritzer, G and Goodman DJ. 2003).
- Ritzer, G and Goodman, Douglas J. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spillane, James J. 1990. *Komoditi Kopi. Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Swedberg, R. 1998. *Max Weber and the Idea of Economic Sociology*. New Jersey, USA: Princeton University Press.
- Swedberg, R. 2005. *Market in Society Dalam The Handbook of Economic Sociology. Second Edition*. Smelser Neil J and Richard Swedberg (Editor). 2005. Princeton University. Hal 233-253.
- Weber. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. Berkeley University of California Press.